

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pariwisata¹ telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berfikir yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan taraf hidup serta mampu mengaktifkan berbagai sektor usaha pariwisata² dalam hal menerima wisatawan³. Disamping itu pariwisata terbukti telah mengangkat kehidupan masyarakat, karena sektor ini mampu menggerakkan roda perekonomian di segala lapisan masyarakat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan pembangunan dan pengembangan wilayah⁴. Pariwisata sebagai sebuah sektor

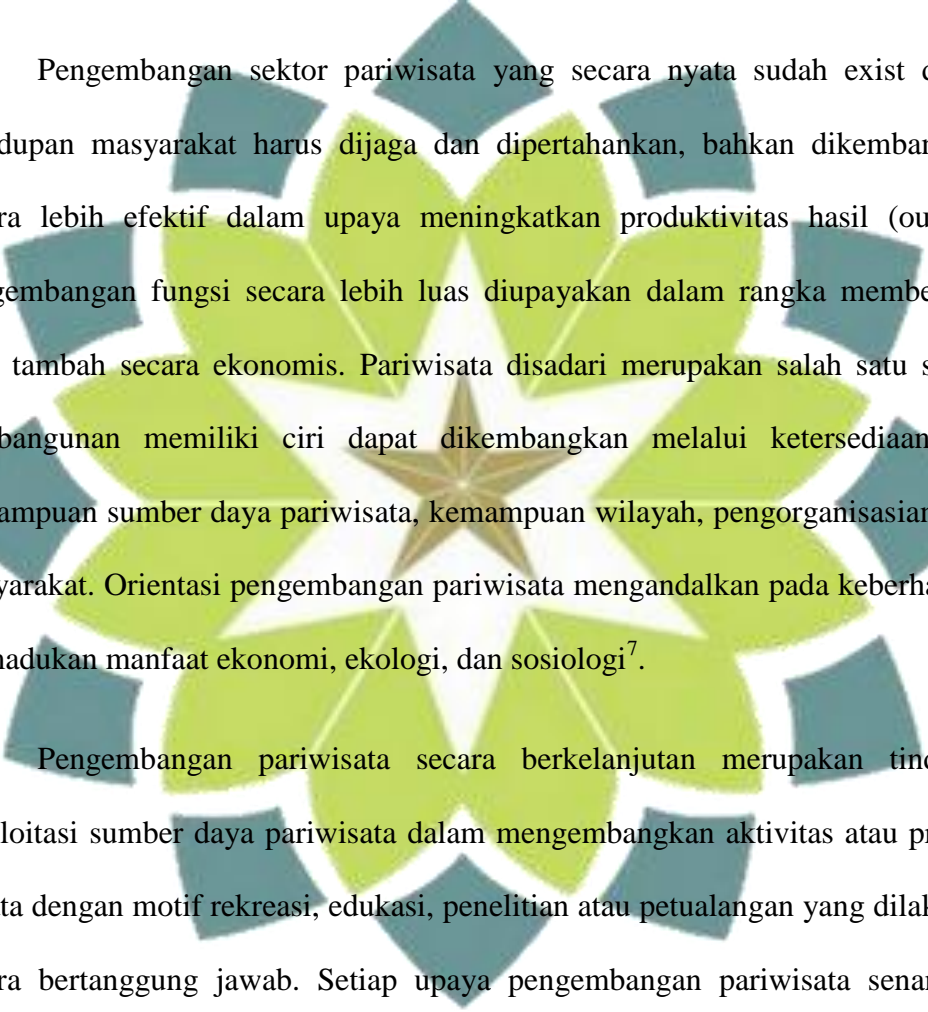
¹ Pariwisata berasal dari bahasa sansakerta, sesungguhnya bukanlah "tourisme" (bahasa belanda) dan "tourism" (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian "tour". Pariwisata berasal dari dua kata yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali berputar dan wisata yang berarti perjalanan atau bepergian. Maka kata pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali (Yoeti, *Pengantar Ilmu pariwisata*, Bandung, Angkasa: 1996 hal 112-113)

² Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan di penyelenggara kepariwisataas (Peraturan daerah provinsi Jawa barat nomor 8 tahun 2008 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

³ Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan pariwisata. Jenis-jenis wisatawan antara lain: wisatawan asing maupun wisatawan lokal. (Kodya, *Sejarah pariwisata dan perkembanganya di indonesia*, Jakarta, Gramedia widiasarana indonesia: 1996 hal 124)

⁴ Departemen kebudayaan dan pariwisata, *Panduan pelaksanaan sadar wisata*, Jakarta: 2008 hal

yang kompleks, meliputi berbagai industri pariwisata⁵ yang lain, diantaranya usaha kerajinan tangan, cinderamata, akomodasi dan transportasi, disamping itu pariwisata berperan penting dalam menyerap kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja dengan meningkatnya wisata dimasa yang akan datang⁶.



Pengembangan sektor pariwisata yang secara nyata sudah exist dalam kehidupan masyarakat harus dijaga dan dipertahankan, bahkan dikembangkan secara lebih efektif dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil (output). Pengembangan fungsi secara lebih luas diupayakan dalam rangka memberikan nilai tambah secara ekonomis. Pariwisata disadari merupakan salah satu sektor pembangunan memiliki ciri dapat dikembangkan melalui ketersediaan dan kemampuan sumber daya pariwisata, kemampuan wilayah, pengorganisasian, dan masyarakat. Orientasi pengembangan pariwisata mengandalkan pada keberhasilan memadukan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosiologi⁷.

Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan merupakan tindakan eksploitasi sumber daya pariwisata dalam mengembangkan aktivitas atau produk wisata dengan motif rekreasi, edukasi, penelitian atau petualangan yang dilakukan secara bertanggung jawab. Setiap upaya pengembangan pariwisata senantiasa dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap ketahanan daya dukung dan nilai-nilai yang dimiliki. Pemilihan aktivitas ataupun pengembangan

⁵Industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Yoeti, *Pengantar Ilmu pariwisata*, Bandung, Angkasa: 1996 hal 153)

⁶ Disparbud Jawa Barat, *Destinasi Pariwisata*, (Bandung: 2006) hal 30

⁷ Ibid hal 70.

sarana harus dilakukan secara terukur untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan ekologi.⁸ Sesuai dengan visi dan misi Disparbud Provinsi Jawa Barat, sektor pariwisata adalah mendukung kegiatan pembangunan yang lebih luas, memperbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD), memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memperkaya budaya dan kepribadian bangsa⁹. Dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata diperlukan suatu kebijaksanaan dan strategi. Maka salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah menyiapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana.¹⁰

Pengembangan pariwisata tidak hanya diarahkan untuk menjangkau wisatawan mancanegara tetapi juga wisatawan nusantara. Sejalan dengan perkembangan dunia pariwisata yang nampak semakin meningkat, serta terdapatnya kawasan-kawasan yang potensial untuk dijadikan obyek pariwisata, pada saat ini sedang giat menata dan mengembangkan sektor ini sebagai suatu “*multi beneficial sector*”, tersedianya jenis usaha baru sebagai alternative pendapatan terutama bagi masyarakat setempat, pasar baru bagi produk-produk local, fasilitas serta jasa pelayanan masyarakat, serta penerapan keahlian dan teknologi baru, dalam meningkatnya kesadaran masyarakat akan sadar wisata¹¹.

⁸ Kodhyat, *Sejarah pariwisata dan perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Gramedia widiasarana indonesia, 1996) hal 64-65

⁹ Disparbud Jawa Barat, *Wajah Pariwisata Jawa Barat* (Bandung: 1985) Hal 47

¹⁰ Ibid hal 55

¹¹ Sadar wisata adalah partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif guna mendukung kepariwisataan di destinasi dengan menerapkan sapta pesona (UU RI No 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataaan) hal 5

Berdasarkan observasi dan berbagai informasi bahwa perkembangan pariwisata ditentukan oleh profesionalisme sumberdaya manusia yang ada, khususnya dalam menciptakan citra baik obyek wisata tersebut, sebagai karakteristik usaha jasa. Kurangnya profesionalisme sumberdaya manusia mungkin akan berhubungan dengan keterbatasan dalam cara mempromosikan obyek wisata, kurangnya keterampilan pemandu wisata untuk wisatawan mancanegara, kurangnya rasa aman bagi pengunjung dan belum tertatanya sarana wisata yang memadai termasuk belum padunya dalam pengelolaan dan memasyarakatkan berbagai nilai, benda peninggalan, perilaku kehidupan sosial, dan kesenian. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengunjung dan pada akhirnya akan menemukan citra pengelolaan obyek wisata¹².

Sektor pariwisata merupakan salah satu *Core Bisnis* yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) andalan, sebagaimana ditetapkan dalam visi dan misi pembangunan yang dilaksanakan. Hal tersebut memerlukan landasan kebijakan strategis berupa pola perencanaan pemetaan satuan kawasan wisata yang komprehensif dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)¹³.

¹² Herman Bahar, *Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui konsep kawasan wisata unggulan*, (Bandung: RIPPDA Jabar, 2005)

¹³ Herman Bahar, *Posisi dan Kondisi Pariwisata sebagai core business* (Bandung: DISPARBUD, 2006) hal 70

Paradigma kepariwisataan yang berkembang saat ini adalah *Pariwisata Berbasis Masyarakat*,¹⁴ hal ini dimaksudkan bahwa kontribusi masyarakat menjadi subyek pengembangan yang dapat berperan aktif dan dapat pula merasakan manfaatnya secara langsung. Pengembangan pembangunan kepariwisataan pada upaya konservasi, revitalisasi, dan rekonstruksi unsur seni dan budaya sedangkan pengembangan kebudayaan sebagai upaya dalam peningkatan apresiasi, kreasi, fasilitasi, donasi dan publikasi sehingga tercipta wisata andalan¹⁵.

Dalam tahun 2004 hasil devisa dari sector pariwisata di Indonesia telah mencapai US \$ 4,71 milyar, dengan jumlah wisatawan mancanegara 4,73 juta orang dan Wisatawan nusantara sebanyak 127,77 juta jiwa dengan pengeluaran sebesar Rp. 15,47 trilyun, kemudian tahun 2005 jumlah wisman sebanyak 5.06 juta orang dengan penerimaan devisa sebesar US \$ 5,78 milyar dan wisatawan nusantara sebanyak 126,13 juta jiwa dengan pengeluaran sebesar Rp. 15,77 trilyun¹⁶. Pemerintah menargetkan sector pariwisata dapat menggantikan peran migas sebagai salah satu sumber utama devisa negara. Tahun 2012 sector pariwisata harus mampu menyumbangkan devisa untuk negara terbesar kedua setelah penghasilan devisa dari industri minyak dan produknya. Salah satu upaya upaya yang dilakukan agar sector penyumbang devisa terbesar adalah strategi

¹⁴ Pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata yang seutuhnya dikelola langsung oleh masyarakat di sekitar objek pariwisata dengan menerapkan sapta pesona (DISPARBUD, Standarisasi ODTW Pariwisata, 2011) hal 35

¹⁵ Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: angkasa 1996) hal 89-90

¹⁶ Herman Bahar, *Pengembangan Pariwisata melalui konsep kawasan wisata unggulan, Makalah pad FGD ke 2 dalam penyusunan RIPPDA Jawa Barat*, (Bandung: 2005) hal 7

pemulihan dan peningkatan citra Indonesia sebagai destinasi yang atraktif, aman, nyaman yang sesuai dengan motto SAPTA PESONA¹⁷.

Propinsi Jawa Barat terdiri dari 17 Kabupaten dan 9 Kota, memiliki beberapa daerah tujuan wisata, letaknya dekat dengan Jakarta sebagai gerbang utama bagi masuknya Wisatawan Mancanegara, merupakan suatu potensi pariwisata yang perlu dikembangkan. Misalnya Taman Nasional yang secara organisasi berada dibawah naungan Departemen Kehutanan merupakan bagian dari daerah tujuan wisata di Jawa Barat, memainkan peranan cukup penting dalam menunjang perkembangan pariwisata, khususnya destinasi¹⁸ pariwisata alam¹⁹.

Saat ini strategi pengembangan pariwisata Propinsi Jawa Barat yang telah dibuat adalah dengan menetapkan 6 (enam) wilayah pengembangan pariwisata yang karena letak strategis dan skala prioritasnya yang saling berkaitan satu sama lain terbentuklah suatu paket wisata yang utuh. 5 (lima) Wilayah Pengembangan Wisata (WPW) Jawa Barat, meliputi Satuan Kawasan Wisata (SKW). Kawasan Pariwisata yang menjadi andalan untuk direncanakan dan dikembangkan meliputi:

1. Kawasan Wisata Koridor Puncak dan sekitarnya (SKW A) termasuk dalam hal ini jalur puncak diarahkan untuk kegiatan wisata alam, peristirahatan dan ilmu pengetahuan (wisata ilmiah) serta konvensi.

¹⁷ Ibid hal 10 (Sapta pesona adalah iklim kondusif bagi aktivitas kepariwisataan, meliputi tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, nyaman, indah, dan kenangan)

¹⁸ Destinasi adalah kawasan sekitar objek wisata yang mendukung kepariwisataan.

¹⁹ DISPARBUD, *Wajah pariwisata Jawa barat*, (Bandung: 2000) hal 47

2. Kawasan Wisata Koridor Pelabuhan Ratu dan sekitarnya (SKW B) diarahkan untuk kegiatan wisata alam dan pantai.
3. Kawasan Wisata Koridor Tangkuban Perahu, Ciatur dan sekitarnya (SKW C) diarahkan untuk kegiatan wisata konvensi, wisata alam, wisata budaya dan ilmu pengetahuan (pendidikan).
4. Kawasan Wisata Koridor Tirtamaya dan sekitarnya (SKW D) diarahkan untuk kegiatan wisata alam dan budaya.
5. Kawasan Wisata Koridor Pangandaran dan sekitarnya (SKW E), diarahkan untuk kegiatan wisata alam dan pantai.²⁰

Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat mempunyai luas wilayah 117.857,55 hektar, yang terbagi dalam 32 Kecamatan 361 desa serta 15 kelurahan. Jumlah penduduknya sebanyak 1.061.291 jiwa. Kabupaten Kuningan terletak di kaki Gunung Ciremai, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Cirebon, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, sebelah selatan dengan kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dan kabupaten Ciamis, serta sebelah barat dengan kabupaten Majalengka²¹. Daerah kabupaten Kuningan terdiri atas: perbukitan, lereng, lembah, daratan yang indah, berudara sejuk dengan temperatur 18-30 derajat celcius, kaya dengan objek dan daya tarik wisata yang alami dan menyegarkan (*Natural and Fresh Tourism Objects*), serta didukung oleh kesenian daerah yang beraneka ragam (*Various Unique Traditional Art*). Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mundel dan enjoy dengan

²⁰ Ibid. Hal 87-100

²¹ Monografi Kabupaten Kuningan

objek wisatanya,²² kabupaten Kuningan memiliki visi dibidang kepariwisataan: *Sektor Pariwisata menjadi andalan Perekonomian Daerah Berdasarkan Sumber Daya Alam dan Budaya yang lestari dan agamis.*²³ Misi pertamanya adalah Menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai Daerah Tujuan Wisata Regional Jawa Barat.²⁴

Kabupaten Kuningan adalah salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Barat. Prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah menjadikan sektor pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan pada objek dan daya tarik wisata, serta penggalan objek wisata. Kabupaten Kuningan menjadikan sektor pariwisata ini sebagai andalan perekonomian daerah yang berbasiskan sumber daya alam, budaya yang lestari dan agamis.²⁵

Kabupaten Kuningan memiliki latar belakang sejarah yang unik dan panjang. Keberadaan komunitas manusia pertama yang terorganisasi dan menetap di wilayah Kabupaten Kuningan berlangsung pada 2500-1500 SM. Pada masa sejarah yang dicirikan olah adanya budaya tulisan, sistem kemasyarakatan paling awal yang ditemukan di Kabupaten Kuningan adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sang Pandawa atau Sang Wiragati pada Tahun 612-702 M dengan keyakinan resmi yang dianut Hindu. Perkembangan daerah dan masyarakat Kuningan

²² Edi S Ekdjati, *Sejarah Kuningan: Dari masa prasejarah hingga terbentuknya kabupaten*, (Bandung: Kiblat buku utama) hal 15

²³ Dading Abidin anwar, *Kuningan dalam kenangan remaja-pemuda dari masa*, (jakarta: Nawaitu pusaka, 2008) hal 20

²⁴ Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

²⁵ Azrul Reza Rifqi Amiruddin, *"Pengelolaan Obyek-obyek Wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupeten Kuningan Jawa Barat"* (Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Program Keahlian Ekowisata Direktorat Proqram Diploma Institut Pertanian Bogor, 2008), hlm. 1

selanjutnya ditandai oleh silih bergantinya pemerintahan lokal, yang secara umum dapat dibagi ke dalam empat pembabakan besar, yaitu pada masa pemerintahan Hindu, pemerintahan Islam, pemerintahan Kolonial, dan masa setelah kemerdekaan.²⁶ Pada masa pemerintahan Hindu tercatat bahwa pada tahun 732 M, seorang tokoh masyarakat mendirikan kerajaan di wilayah Kuningan yang baru meliputi beberapa daerah pada waktu itu. Tahun tersebut menandai adanya pemerintahan resmi di wilayah Kuningan.²⁷

Pada masa perkembangan Islam di Kabupaten Kuningan ditandai oleh upaya penyebaran Islam oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) yang dilakukan pertama kali ke wilayah Luragung pada tahun 1481. Pada masa tersebut berlangsung momentum penting yaitu pengukuhan Pangeran Kuningan yang merupakan anak didik (murid) Syarif Hidayatullah, menjadi kepala pemerintahan Kuningan pada tanggal 1 September 1498 dengan gelar Pangeran Ariya Adipati Kuningan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 21/Dp.003/XII1978 tanggal 14 Desember 1978. Tanggal 1 September sebagai hari berdirinya kabupaten Kuningan (hari jadi Kuningan) yang selalu diperingati setiap tahun sampai dengan sekarang.²⁸

Masa kolonial diawali dengan munculnya pengaruh politik dan militer dari Belanda yang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia. Dalam masa kolonial ini, kepemimpinan pemerintahan lokal-pribumi tetap dipertahankan dengan

²⁶Azrul Reza Rifqi Amiruddin, *op. cit.*, hlm. 3.

²⁷Dading Abidin Anwar, *Kuningan dalam Kenangan Remaja-Pemuda dari Masa ke Masa* (Jakarta: Pustaka Nawaitu 2008), hlm. 28.

²⁸*Ibid.*,

diposisikan di bawah kendali pemerintahan kolonial. Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, terjadi perubahan sistem pemerintahan, pada tahun 1809 pemerintah kolonial Belanda menghapus sistem raja (sultan). Abdi kerajaan dijadikan pegawai raja Belanda dengan pangkat bupati dan di bawah bupati ada Wedana yang tunduk pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perubahan ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Kuningan dari tahun 1650-1800. Hal ini terkait dengan dimulainya periode kejayaan VOC di Pulau Jawa termasuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Daerah Kuningan dipecah menjadi beberapa kewedanan yang meliputi beberapa kecamatan.²⁹

Setelah kemerdekaan terhitung semenjak rakyat Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka yaitu pada tahun 1945 terdapat dua versi kepemimpinan di Kabupaten Kuningan, karena Belanda belum mau melepaskan cengkramannya. Pada tahun 1946, Desa Ciwaru menjadi tempat pemerintahan sementara Karesidenan Cirebon dalam menghadapi Agresi ke I oleh Belanda yang telah menguasai Cirebon dan Kuningan.³⁰

Dari sisi peran terhadap wilayah di sekitarnya, sejarah sejak masa kerajaan hingga masa kolonial menunjukkan bahwa Kuningan lebih banyak memainkan peran sebagai penyangga atau penyokong wilayah di sekitarnya, khususnya wilayah Cirebon. Pada masa tersebut, sokongan terutama berupa dukungan pertahanan militer dari ancaman ekspansi dari pemerintah wilayah lain. Selain itu

²⁹Dading Abiding Anwar, *op. cit.*, hlm. 29

³⁰*Ibid.*, hlm. 31.

sokongan yang diberikan juga berupa dukungan ekonomi terhadap wilayah induknya.³¹

Pada masa itu Kuningan merupakan wilayah yang difungsikan sebagai penyedia sumberdaya air untuk budidaya pertanian di wilayah utara dan sebagai penyedia jasa nyaman lingkungan untuk peristirahatan. Sebagai wilayah dengan akar sejarah yang panjang serta telah mengembangkan identitas kemasyarakatan yang unik dan memiliki potensi yang memadai maka Kuningan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Barat.³²

Kabupaten Kuningan memiliki objek daya tarik wisata (ODTW), tersebar di beberapa desa, yang terdiri dari wisata budaya, alam, olah raga, agama dan lain-lain. Salah satu diantaranya adalah situs purbakala Cipari yang terletak di kelurahan Cipari kecamatan Cigugur. Jarak dari Kuningan 4,7 km. Situs ini ditemukan tahun 1972, berupa kuburan batu. Ditemukan pula perkakas batu, grabah, perunggu, bekas-bekas pondasi bangunan dan bangunan batu besar yang disebut Meganit. Hasil penelitian menunjukkan situs Cipari mengalami dua kali pemukiman pada akhir neolitik berkisar antara tahun 1000 SM (Sebelum Masehi)

³¹Dading Abiding Anwar, *loc. cit.*,

³² Azrul Reza Rifqi Amiruddin, *op. cit.*, hlm. 4.

sampai dengan 500 M (Masehi). Pada waktu itu masyarakat sudah mengenal organisasi dan pemujaan terhadap nenek moyang.³³

Objek wisata lain adalah Puncak Gunung Ciremai yang memiliki pemandangan indah. Ini merupakan salah satu objek wisata alam yang kini banyak dikunjungi wisatawan terutama wisatawan domestic (wisdom) atau local, yaitu anak-anak muda maupun anak-anak sekolah pada waktu liburan panjang. Pendakian ke Gunung Ciremai dilakukan melalui 2 jalur pendakian yaitu: Pertama dari arah Linggarjati. Kedua dari arah curug Ciputri daerah Palutungan Kuningan. Sungguh suatu panorama pemandangan alam yang menakjubkan bila kita lihat dari puncak Gunung Ceremai.³⁴

Melewati pedesaan Linggarjati kita bisa singgah di gedung bersejarah "*Gedung Perundingan Linggarjati*" yang merupakan monumen saksi hidup akan perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan ini terletak di desa Linggarjati Kecamatan Cilimus di kaki gunung Ciremai bagian tenggara. Jarak dari kota Kuningan kurang lebih 14 km daerah utara. Atau 26 km dari kota Cirebon ke arah selatan. Tanggal 11 s/d 15 November 1946 gedung Linggarjati pernah digunakan sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang diwakili oleh Dr Van Boer. Sedangkan dari pihak Indonesia diwakili oleh PM. Sultan Syahrier dengan anggota A.K.Ghani Soesanto Tirtodiprodo dan Mr. Mohammad Roem. Sebagai penengahnya adalah Lord Killearn dari kerajaan

³³ Dading Abidin anwar, *Kuningan dalam kenangan remaja-pemuda dari masa*, (jakarta: Nawaitu pusaka, 2008) hal 20

³⁴ DISPARBUD, *Wajah pariwisata jawa barat/west java golden visage*, (bandung, 2000) hal 86-90

Inggris. Dengan demikian, Linggarjati adalah objek wisata sejarah yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja apabila kita berkunjung ke kabupaten Kuningan³⁵.

Objek wisata lain adalah Agrowisata atau Wisata Pertanian, yaitu panorama pemandangan persawahan dan perbukitan yang indah, serta diselingi kelompok rumah-rumah tradisional petani di pedesaan yang cukup mempesona dan unik. Tentunya terutama bagi wisatawan mancanegara (wisman). tidak akan kalah dengan Agrowisata sawah di Thailand, maupun objek wisata alam *Niagara Fall dan Grand Canyon di AS*.³⁶ Demikian pula industri-industri tradisional yang mengolah beberapa produk pertanian (selain padi) yang terkenal dari Kuningan antara lain Tape beras ketan (peuyeum) Cijoho, bawang goreng Garawangi, tepung ubi jalar (boled), serta Jeniper singkatan dari Jeruk Nipis Peras, minuman segar khas kabupaten Kuningan. Semua olahan produk pertanian tersebut, diberitakan telah benar-benar *go public* bahkan *go international*, diekspor ke luar negeri.³⁷

Objek wisata alam, budaya, dan sejarah yang ada di beberapa tempat merupakan modal dasar pariwisata yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bercorak agraris³⁸. Praktis objek pariwisata yang ada di kabupaten Kuningan merupakan objek wisata tirtamaya (air). Waduk darma merupakan salah satu objek wisata dengan kondisi alam yang cukup indah, dimana para pengunjung

³⁵ Euis thresnawati, *Peninggalan sejarah sebagai obyek wisata di kabupaten kuningan*, (bandung: laporan penelitian, 1996) hal 21-25

³⁶ DISPARBUD, *Wajah pariwisata jawa barat/west java golden visage*, (bandung, 2000) hal 52

³⁷ Ibid. Hal 55

³⁸ Ibid. Hal 73

dapat berekreasi sambil naik perahu dan memancing ikan³⁹. Kemudian, objek wisata alam lainnya yang terdapat di beberapa tempat pada umumnya dilengkapi sarana kolam renang seperti kolam renang Cibulan, Cigugur, Darmaloka dan Linggajati yang terkenal disamping mempunyai nilai sejarah, kolam renang tersebut berisi ikan-ikan yang dikeramatkan dan tidak terdapat di daerah lain⁴⁰.

Objek wisata budaya yang ada di kabupaten Kuningan merupakan antraksi wisata cukup menarik dan tidak lepas dari nilai seni budaya atau tradisi masyarakat Jawa Barat dengan ciri khas Sunda. Beberapa antraksi wisata dalam bentuk upacara dan kesenian daerah yang terdapat di kabupaten Kuningan antar lain berupa Saptonan, Cingcowong, Pesta dadung, Seren tahun, dan lain-lain⁴¹. Pariwisata di Kabupaten Kuningan sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat mendatangkan banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan yang baik dengan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dibidang pariwisata, sehingga sektor pariwisata menjadi andalan perekonomian daerah berbasis alam dan budaya⁴²

Sumber daya alam dan khasanah budaya yang mendukung keberhasilan pengelolaan kepariwisataan, dijadikan bahan untuk menopang pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pengelolaan sektor pariwisata, pemerintah kabupaten Kuningan tidak berdiri sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam memajukan sektor pariwisata di daerah, pemerintah daerah

³⁹ Ibid. Hal 80

⁴⁰ Ibid. Hal 90

⁴¹ Ibid. Hal 97

⁴² Euis Thersnawati, Peninggalan sejarah sebagai objek wisata dikabupaten kuningan (Laporan Penelitian: Bandung, 2008) hal 15

mengarahkan pada pendayagunaan, pemantapan, dan perencanaan pembangunan pariwisata secara komprehensif. Meningkatkan promosi lingkup regional, nasional, dan internasional. serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan moral agama⁴³.

Sejak tahun 1980-an penerimaan daerah dari sector pariwisata di Kabupaten Kuningan meningkat pesat dan menjadi komidi unggulan dalam aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁴⁴. Posisi penerimaan pendapatan dari sector pariwisata pada tahun tersebut berada pada urutan ke-empat.⁴⁵ diawal krisis moneter terjadi penurunan yang drastis arus kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kabupaten Kuningan. Hal ini dikarenakan kurangnya keseriusan Pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. Kemunduran sector pariwisata tidak hanya terjadi di kabupaten Kuningan, tetapi di berbagai wilayah Indonesia, terjadinya krisis moneter dan memburuknya perekonomian di Indonesia yang berdampak langsung kepada sector pariwisata.⁴⁶

Pariwisata merupakan suatu bisnis besar dalam penyediaan barang dan jasa untuk wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan dalam perjalanannya.⁴⁷ Adapun dampak dengan berkembangnya pariwisata antara lain, yang secara ekonomi menghasilkan pendapatan dan dapat

⁴³ H.Kodhyat, *Sejarah pariwisata dan perkembangannya di inonesia*, (Gramedia, 1996) hal 66

⁴⁴ Wawan Hermawan, *Kuningan menembus waktu*, (Jakarta: Nawaitu pusaka, 2000) hal 61

⁴⁵ Ibid. Hal 65

⁴⁶ Ibid. Hal 43

⁴⁷ James J. Spillane, *Ekonomi pariwisata: sejarah dan prospeknya* (yogyakarta: kanisius, 1987) hal 51-53

hidup terus menerus, dari segi sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat, dari segi pertahanan dan keamanan dapat dikendalikan, dan dari segi ideologi dan politik cocok dan menguntungkan. Dalam upaya meningkatkan kembali wisatawan mancanegara, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara terciptanya rasa aman, keindahan dan daya tarik kawasan, intensitas dan sifat pengelolaan, alternative pilihan rekreasi lain, kapasitas sarana wisata yang tersedia, dan karakteristik iklim atau cuaca tempat rekreasi⁴⁸.

Penelitian ini akan dibatasi oleh aspek spasial dan temporal. Untuk aspek spasial penelitian ini akan mengambil wilayah Kabupaten Kuningan, dikarenakan ke-khasan dan ke-unikan sumber daya pariwisata yang dimiliki yaitu alam dan budaya, selain sebagai tempat wisata, juga cocok untuk pendidikan lingkungan dan kebudayaan serta tempat bertafakur kepada Maha Pencipta Alam. Sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 190-191 Yang artinya *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."* Dan ke-khasan yang dimiliki sebagian besar obyek wisata di kabupaten Kuningan dilengkapi dengan sarana pemandian atau kolam renang. Sehingga Kabupaten Kuningan masuk dalam kategori Satuan Kawasan Wisata (SKW D) bagi

⁴⁸ Ibid. Hal 60-65

perjalanan wisatawan mancanegara di Jawa Barat, sebagai pusat kegiatan wisata alam, dan budaya, dalam Destinasi Tirtamaya Jawa Barat.

Selain itu penulis memilih kabupaten Kuningan, dikarenakan Pada masa perkembangan dan penyebaran Islam tahun 1481 di Kabupaten Kuningan oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati). yaitu pengukuhan Pangeran Kuningan yang merupakan anak didik (murid) Syarif Hidayatullah, menjadi kepala pemerintahan kabupaten Kuningan pada tanggal 1 September 1498, Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 21/Dp.003/XII1978. Tanggal 1 September sebagai hari berdirinya kabupaten Kuningan (hari jadi Kuningan) yang selalu diperingati setiap tahun sampai dengan sekarang. Penduduk kabupaten Kuningan umumnya adalah suku Sunda yang menggunakan Bahasa Sunda dalam kesehariannya, Disamping memiliki karakter kuat budaya sunda, "*Someah hade ka semah*" yang menjadi dasar pokok bagi kegiatan kepariwisataan, penduduk Kabupaten Kuningan 98% mayoritas beragama Islam.

Dan juga penulis tertarik dengan Visi dan Misi pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan "*Dengan Iman dan Taqwa, kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat*" yang mengembangkan sektor pariwisata sebagai aspek unggulan dalam pendapatan Daerah, dengan menerapkan SAPTA PESONA di berbagai kawasan obyek wisata. Berdasarkan rancangan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang disusun bersama berdasarkan atas keinginan besar masyarakat sehingga akan menjadi kerangka

besar perencanaan pembangunan yang meringkai dan memberikan batasan (koridor) bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Visi ini menegaskan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh Kabupaten Kuningan yaitu menjadi Kabupaten pertanian dan wisata yang paling maju diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Agropoltan dan Wisata mengandung pengertian Kabupaten yang produksi daerahnya didominasi oleh dua besar sektor yaitu secara berturut-turut sektor pertanian dan jasa pariwisata.

Untuk aspek temporal penentuan batas waktu penelitian ini di latar belakang oleh beberapa hal. Batas awal, yaitu pada tahun 1950 dikarenakan pada tahun tersebut Kuningan secara resmi masuk dalam kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Batas akhir mengambil hingga tahun 1998 dikarenakan pada tahun itu Indonesia mengalami suatu krisis moneter yang sangat merugikan. Melemahnya perekonomian di Indonesia, mengakibatkan sektor-sektor ekonomi mengalami penurunan pesat diantaranya adalah sektor kepariwisataan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Kepariwisata di Kabupaten Kuningan ?
2. Bagaimana Kepariwisata di Kabupaten Kuningan Tahun 1950 - 1998 ?
3. Bagaimana Pengembangan dan Promosi Kepariwisata di Kabupaten Kuningan Tahun 1950 - 1998 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Latar Belakang Munculnya Kepariwisata di Kabupaten Kuningan ?
2. Mengetahui Kepariwisata di Kabupaten Kuningan Tahun 1950 - 1998 ?
3. Mengetahui Pengembangan dan Promosi Kepariwisata di Kabupaten Kuningan Tahun 1950 - 1998 ?

1.4 Langkah-Langkah Penelitian

Dalam langkah-langkah penelitian digunakan empat langkah, yaitu sebagai berikut :

1.5 Heuristik

Heuristik secara etimologi berasal dari bahasa jerman yaitu *heurisch* yang artinya *to invent, discover* (menemukan, mengumpulkan)⁴⁹ heuristik merupakan

⁴⁹ Kamus Webster's, *New Word College Dictionary*, (Macmillan:USA, 1996) hal 634

jalan tahapan mengumpulkan informasi⁵⁰ atau keterampilan dalam menemukan sumber⁵¹ yang dikumpulkan sesuai dengan sejarah yang ditulis⁵². Sumber diklasifikasikan secara garis besar atas peninggalan-peninggalan (*relics atau remains*) dan catatan-catatan (*record*).⁵³ Menurut bahanya dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan *artifact*.⁵⁴ Sumber-sumber tulisan dan lisan tersebut dibagi atas dua jenis yaitu: sumber primer dan sekunder.⁵⁵

Sumber primer⁵⁶ atau *primary sources*⁵⁷ atau *source based*⁵⁸ adalah sumber-sumber asli sebagai sumber pertama. Sumber asli (orisinal) ini yang kontemporer (sezaman) dengan sesuatu peristiwa yang terjadi⁵⁹. Dalam tahap pertama ini, penulis melakukan pengumpulan berbagai sumber yang berkaitan dengan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan pasca kemerdekaan, dan data-data lain yang bersifat mendukung.

Sejauh ini yang diperoleh adalah sumber tertulis berupa majalah, koran yang berisi informasi seputar kepariwisataan di Kabupaten Kuningan, dan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang pariwisata. Selain majalah dan koran penulis mengumpulkan artikel-artikel ataupun brosur-brosur tentang kepariwisataan di kabupaten Kuningan. Penulis memperoleh Peraturan Daerah

⁵⁰ Lois Gottscalk, *Mengerti sejarah* (Jakarta: (UI-Press, 1985) hal 35

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999) hal 55

⁵² Kuntowijoyo, *Pengantar ilmu sejarah*, (yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005) hal 95

⁵³ Helius sjamsuddin, *Metodologi sejarah*, (yogyakarta: OmBak, 2007) hal 96

⁵⁴ Ibid. Hal 95

⁵⁵ *Op cit*, Lous Gottscalk, hal 35

⁵⁶ Sebutan dari louis Gottscalk

⁵⁷ Sebutan dari helius sjamsuddin

⁵⁸ Sebutan dari jerzy topolsky

⁵⁹ *Op Cit*. Helius Sjamsuddin. Hal 106-107

(PERDA) kabupaten Kuningan tahun 1980-2000 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Penulis menjadikan Peraturan Daerah (PERDA) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) kabupaten Kuningan sebagai sumber primer karena menjadi pedoman dan acuan pemerintah daerah, dalam pembangun dan pengembangan sektor kepariwisataan di daerah kabupaten Kuningan dalam jangka waktu yang panjang (RPJP) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Sehingga pembangunan dan pengembangan kepariwisataan menjadi terstruktur, terarah, fokus dan berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi daerah. Penulis juga mendatangi dan mewawancarai staf-staf yang berhubungan dengan objek wisata yang diteliti sebagai sumber lisan. Dan sumber primer dalam bentuk visual berupa foto-foto objek wisata yang berada di kabupaten Kuningan, Denah Gedung Perundingan Linggajati, Peta Kabupaten Kuningan, dan Peta Potensi Pariwisata.

Sedangkan sumber sekunder⁶⁰ atau *secondary sources*⁶¹ atau *non-source-based*⁶² adalah tulisan yang berdasarkan sumber pertama.⁶³ Informasinya merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.⁶⁴ Tulisan ini yang memberikan bahan-bahan praktis atau teoritis yang penting bagi sejarawan⁶⁵. Sumber sekunder ini banyak diperoleh dari buku-buku dan internet diantaranya: Buku karya Wawan Hermawan, 2000 yang berjudul “*Kuningan*

⁶⁰ Sebutan dari louis Gottscalk

⁶¹ Sebutan dari helius sjamsuddin

⁶² Sebutan dari Jerzy Topolski

⁶³ Op Cit. Helius Sjamsuddin. Hal. 106-107

⁶⁴ Ibid. Hal 119

⁶⁵ Op Cit. Helius Sjamsuddin. Hal 119

Menembus Waktu” sebanyak 198 halaman, menceritakan tentang potensi-potensi wisata yang berada di kabupaten Kuningan yang sangat besar. Dalam buku ini banyak menceritakan objek-objek pariwisata yang berada di kabupaten Kuningan, yang didukung oleh letak geografis yang berada di kaki gunung ciremai. Pada buku ini selain membahas objek pariwisata juga membahas bagaimana promosi dan pengembangan pariwisata di kabupaten Kuningan.

Selain itu karya Edi S Ekadjati menulis tentang sejarah kabupaten Kuningan berjudul “*Dari Masa Prasejarah Hingga Terbentuknya Kabupaten Kuningan,*” 2003. Dalam buku ini tidak menceritakan tentang industri pariwisata tetapi menjelaskan sejarah Kabupaten Kuningan dengan ditemukannya benda-benda prasejarah di kaki gunung ciremai lalu menyimpannya di Taman Purbakala Cipari sampai terbentuknya Kuningan menjadi sebuah Kabupaten Kuningan di Jawa Barat yang masuk dalam Daerah Wilayah III Cirebon. Meskipun buku ini tidak berhubungan langsung dengan pariwisata, namun buku ini sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan.

Karya Dading Abidin Anwar dengan judul “*Kuningan Dalam Kenangan Remaja-Pemuda Dari Masa,*” 2008. Ia menulis tentang sejarah Kuningan dari zaman kerajaan Galuh sampai zaman Orde Baru. Pada buku ini juga menjelaskan tentang aspek-aspek yang berada dalam suatu masyarakat seperti aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Pada aspek sosial menjelaskan mata pencarian, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kuningan. Aspek budaya lebih menjelaskan tradisi yang bersifat permainan-permainan tradisional masyarakat Kuningan.

Karya R.G Soekadijo yang berjudul “*Anatomi Pariwisata*”, Memahami Pariwisata sebagai “*Systemic Linkage*”. Buku ini menguraikan tentang pariwisata sebagai sebuah industri dan dapat menjadi *income* yang sangat baik bagi negara, buku ini lebih menekankan kepada pariwisata sebagai sebuah industri dimana industri pariwisata merupakan industri yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dilepaskan. Dalam industri pariwisata di kabupaten Kuningan terdapat industri perhotelan, industri jasa boga, industri transportasi, industri cinderamata dan industri lainnya.

1.6 Kritik

Setelah berhasil mengumpulkan sumber dari berbagai kategorinya, tahap berikutnya ialah verifikasi, atau kritik sumber. Dasar kritik ini adalah hati-hati dan ragu tentang informasi-informasi yang dikandung sumber sejarah tersebut, setelah itu, mempelajari sumber, memahaminya dan mengambil kesimpulan realita-realita dari sumber tersebut.⁶⁶ Tahap ini dilakukan untuk menguji keabsahan sumber tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.

Dalam kritik ekstern pengujian atas asli dan tidaknya sumber dilakukan dengan menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan, untuk membuktikan otentisitas sumber tersebut, penulis akan menimbang dari beberapa

⁶⁶ Hasan Usman, Metode Penelitian Sejarah, Penerjemah Muin Umar dkk, (Jakarta: Depag, 1986) hal 79-80

aspek, yaitu kapan sumber dibuat, dimana dibuat, siapa yang membuat, dari bahan apa sumber dibuat dan apakah sumber dalam bentuk asli.

Sedangkan pada kritik intern penulis akan menimbang sumber dari segi kebenaran sumber yang meliputi kebenaran isinya, keaslian isinya dan menimbang apakah isi buku dapat dipercaya atau tidak kebenarannya.⁶⁷ Sehingga untuk melihat kredibilitas sumber, penulis akan memperhatikan penyebab kekeliruan sumber. Oleh karena itu kritik dilakukan sebagai alat pengendali atau pengecekan proses-proses tersebut untuk mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi. Penyebab ketidaksahihan isi sumber itu memang sangatlah kompleks, seperti kekeliruan karena perspektif perasaan, karena ilusi dan halusinasi dan lain sebagainya.

Salah satu sumber primer yang dikritik yaitu Peraturan Daerah (PERDA) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) kabupaten Kuningan tahun 1980, karena penulis mendapatkan melalui copy file dari pemerintah daerah kabupaten Kuningan, baik dikritik secara ekstern maupun intern. Secara ekstern isi PERDA dan RIPPDA kabupaten Kuningan dibuat tahun 1980. Lalu ditulis ulang dengan menggunakan komputer sebagai arsip daerah dari sumber bentuk asli karena dibuat langsung oleh pemerintah daerah kabupaten Kuningan, Sedangkan secara intern, kebenaran dan keaslian isinya dapat dipercaya. Kritik sumber ini juga digunakan pada sumber yang lainnya, baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.

⁶⁷ Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999) hal 61

Sedangkan salah satu sumber sekunder yang dikritik yaitu Buku karya Wawan Hermawan, 2000 yang berjudul “*Kuningan Menembus Waktu*” sebanyak 198 halaman, baik secara ekstern maupun intern. Secara ekstern, buku ini diterbitkan tahun 2000 dibuat di Jakarta, ditulis oleh Wawan Hermawan, dari bahan kertas. Sedangkan secara intern, kebenaran dan keaslian isinya dapat dipercaya karena penulis mencantumkan dari mana saja sumber tersebut diambil. Kritik sumber ini juga digunakan terhadap buku-buku atau sumber lain.

1.7 Interpretasi

Interpretasi berasal dari kata *interpretation* yang berarti suatu penjelasan yang diberikan oleh seorang penafsir (*an explanation given by an interpreter*)⁶⁸ interpretasi atau penafsiran sejarah adalah dalam rangka analisis dan sintesis.⁶⁹ Analisis berarti menguraikan karena kadang-kadang sumber mengandung beberapa kemungkinan. Sedangkan sintesis berarti menyatukan. Kemampuan untuk sintesis hanyalah mungkin kalau peneliti mempunyai konsep, yang diperoleh dari bacaan, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan, hasilnya bisa beragam. Disinilah interpretasi sering disebut juga sebagai penyebab timbulnya subjektivitas.⁷⁰

Tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sehingga dalam penafsiran harus mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah

⁶⁸ Op cit, Kamus *Webster's New Word College Dictionary*, hal 505

⁶⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (yogyakarta: Bentang Pusaka, 2005) hal 102-103

⁷⁰ Ibid Hal 103

sebabnya, subjektivitas sejarah diakui, dalam batas-batas yang tidak mengganggu objektivitas sejarah itu sendiri.⁷¹

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan ilmu pariwisata dan UU RI No 10 tahun 2010 tentang Kepariwisataan, menurut Purwowibowo Pariwisata terdiri dari dua kata yaitu pari dan wisata, pari berarti banyak, berkali-kali atau berputar. Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kepariwisataan memiliki arti yang luas, dan bukan hanya sekedar bepergian saja. Namun juga berkaitan dengan objek dan daya tarik wisata yang dikunjungi, sarana transportasi yang digunakan, pelayanan, akomodasi, dan restoran serta interaksi sosial antara wisatawan dan penduduk setempat sebagai *stakeholders*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.⁷² Orang yang melakukan kegiatan pariwisata disebut dengan istilah wisatawan atau dalam bahasa Inggris disebut *tourist* dan hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata disebut kepariwisataan atau dalam bahasa Inggris disebut *tourism*.⁷³ Sedangkan kepariwisataan menurut UU RI No 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang. serta interaksi

⁷¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi kedua, (yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003) hal 94

⁷² Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *UU RI no 10 tahun 2010 tentang kepariwisataan pasal 1* ketentuan umum. Poin 3

⁷³ Ibid. Poin 2

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.⁷⁴

Pariwisata baru akan teraktualisasi bilamana dilakukan kegiatan pemasaran yang terdiri dari promosi, publisitas dan penjualan. Kegiatan promosi dan publisitas yang dimaksud adalah propaganda kepariwisataan dengan didasarkan atas rencana atau program secara teratur dan berlanjut. Penjualan adalah proses berpindahnya produk dari penjual ke pembeli. Dalam hal ini adalah respon terhadap produk pariwisata yang dipasarkan yaitu kedatangan wisatawan.⁷⁵

Untuk melihat dan memahami perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Kuningan pada masa setelah kemerdekaan, aspek yang dilihat adalah perkembangan produk-produk industri pariwisata dan pemasarannya. Produk dari industri pariwisata tersebut adalah komponen-komponen produk pariwisata yang terdiri dari produk bidang atraksi, bidang jasa dan transpor wisata. ada konsumen, ada permintaan (*demand*) dan ada penawaran (*supply*) serta ada produsen yang menghasilkan produk untuk memenuhi permintaan konsumen.⁷⁶

Promosi dan penjualan wisata dikenal dengan pemasaran wisata, adanya produk wisata yang akan dijual dan kemudian dilakukan pemasaran yang pada akhirnya akan melahirkan suatu industri pariwisata. Dalam industri pariwisata yang

⁷⁴ Ibid. Poin 4

⁷⁵ Ditjen Pariwisata, *UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan* (Jakarta: 1998)

⁷⁶ Soekadijo, *Anatomi Pariwisata*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal 54-56

menjadi konsumen adalah wisatawan, sementara produsen adalah penyuplai komponen-komponen produk kepariwisataan, baik pemerintah maupun swasta.⁷⁷

Pada hakekatnya kepariwisataan adalah pembangunan *stakeholders*, titik sentral kepariwisataan terletak pada manusia sebagai pelaksana untuk dapat merubah perilaku lingkungan yang kompleks, kearah daya saing yang bernilai.⁷⁸ Destinasi, atraksi, dan daya tarik adalah sebuah kemajemukan struktur, bentang alam, ruang social entity, budaya yang berkarakter dan saling dukung yang membentuk keharmonisan dan keselarasan yang memberikan kenyamanan dan kenikmatan untuk diapresiasi dan dieksploitasi secara terbatas. Untuk membentuk kualitas Destinasi pariwisata sebagai kumpulan/klaster, parameter dan indikator yang saling dukung.⁷⁹

1.8 Historiografi

Historiografi (penulisan sejarah) merupakan rekonstruksi yang imajinatif⁸⁰ dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sedangkan menurut Badri yatim bahwa secara semantic kata historiografi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *history* yang berarti sejarah dan *grafi* yang berarti deskripsi/ penulis.

⁷⁷ Ibid. Hal 60

⁷⁸ Nyoman s Pedit, *Ilmu Pariwisata: sebuah pengantar perdana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002) hal 72-73

⁷⁹ Ibid. Hal 50

⁸⁰ Louis Gottscalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI-Press, 1985) hal 32

Langkah terakhir dalam suatu penelitian sejarah adalah tahap historiografi yang merupakan langkah untuk menuangkan hasil interpretasi, sehingga menjadi suatu tulisan sejarah yang sistematis. Dalam tahap ini penulis berusaha untuk membuat kesinambungan antara fakta dan data yang diperoleh dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis dan logis.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan meliputi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan Langkah-langkah penelitian.

BAB II Menjelaskan latar belakang munculnya kepariwisataan di kabupaten Kuningan didalamnya terdapat gambaran umum kabupaten Kuningan, Kondisi geografis dan demografis, Pemerintahan, Infrastruktur, Potensi wisata dan Sosial-ekonomi masyarakat. Serta menjelaskan faktor-faktor pendukung berjalannya suatu kepariwisataan di kabupaten Kuningan.

BAB III Membahas tentang kepariwisataan di kabupaten Kuningan. Dalam bab ini terdapat Objek-objek wisata, Pengembangan, Transfortasi, Jasa kepariwisataan yang berupa jasa akomodasi dan jasa-jasa pariwisata lainnya serta Promosi pariwisata.

BAB IV Kesimpulan dimana penulis menguraikan hasil analisis dan interpretasi penulis terhadap perkembangan kepariwisataan di kabupaten Kuningan.

